Pengembangan Madrasah dengan Modal Sosial

Taqiyudin Subki

Dosen IKIP PGRI Semarang, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Majenang

Abstract: The condition of education in Indonesia until now is still quite alarming. Various efforts to increase and development continue to be done, but the results are still not in accordance with social hope. Modal public in the field of education (madrasah) is one that will be introduced as a new approach in education, particularly in the madrasa development that require proper handling, clear, transparent effective, efficient, and requires a container that meets public accountability. In order to increase social capital, have no clear rules making it easier to set a benchmark for the success and failure in implementation.

Keywords: *Social capital, madrasah, Islamic school.*

Pendahuluan

Kondisi pendidikan di Indonesia sampai sekarang ini masih tergolong memprihatinkan. Tidak sedikit pengamat, maupun pejabat bidang pendidikan sendiri yang mengakui hal tersebut. Berbagai upaya peningkatan dan pengembangan terus dilakukan, tetapi hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Sekolah/madrasah masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada struktur.

Minimal ada dua hal yang sering menjadi instrumen pengukuran. *Pertama, international competitiveness*, yaitu kemampuan bersaing di pasaran kerja internasional. Produk dari pendidikan di tanah air di berbagai jenjang masih dianggap kurang bisa berkompetisi bila dibandingkan dengan produk pendidikan dari luar, termasuk kalah bersaing dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, atau Filipina. Hal tersebut memiliki konsekuensi, yaitu sulitnya mereka mencari pekerjaan yang mensyaratkan memiliki keterampilan (*skill labour*). *Kedua*, kemampuan (*capability*) dari produk pendidikan di dalam menguasai ilmu pengetahuan. Tidak sedikit siswa itu memiliki nilai yang sangat baik, dengan indeks prestasi yang tinggi, tetapi mereka sebenarnya

tidak memiliki kemampuan apa-apa di bidang ilmu yang digeluti tersebut. Sekolah banyak yang berlomba untuk meluluskan siswanya 100%, meskipun siswanya kurang memiliki kompetensi yang digelutinya. Oleh karenanya, nilai yang tertera di dalam ijazah atau raport kurang mencerminkan kemampuan siswa.¹

Kondisi pendidikan yang masih memprihatinkan itu memiliki konsekuensi yang panjang bila dihubungkan dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena keduanya tidak bisa dipisahkan (*inseparable*). Kualitas pendidikan akan menentukan tingkat pengangguran, kuantitas dan kualitas kreasi dan motivasi di dalam berbagai bidang kehidupan, kriminalitas, moral, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika bangsa ini banyak disorot dari sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan, maka pendidikan sering menjadi "tersangka utama" karena pendidikan dianggap institusi yang paling bertanggung jawab di dalam menyiapkan sumber daya manusia.

Setelah pemerintah mendapatkan kritik dari berbagai pihak tentang rendahnya mutu pendidikan ini, maka berbagai kebijakan telah dilakukan. Ada tiga kategori kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tanah air, yaitu:

1. Perbaikan sarana prasarana, baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Tidak sedikit gedung sekolah diperbaiki atau dibangun baru, menambah fasilitas perpustakaan dan laboratorium;
2. Perbaikan finansial baik yang berupa kenaikan gaji guru maupun bantuan keuangan langsung ke sekolah, seperti BOS, *Block Grant*, bantuan khusus murid, dan sebagainya; dan
3. Perbaikan SDM, baik bagi guru, masyarakat maupun kepala sekolah. Tidak sedikit guru yang mendapatkan kesempatan penataran, pelatihan, *workshop*, seminar, dan sebagainya. Dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit.²

Namun demikian, data di lapangan menunjukkan tidak ada peningkatan yang berarti di dunia pendidikan. Meskipun gaji guru terus dinaikkan, bantuan kepada sekolah semakin diperbanyak, penataran banyak dilakukan, manajemen diperbaiki tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di tanah air. Hal ini tentu mengundang pertanyaan ada persoalan di

lembaga pendidikan di tanah air ini. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa *financial capital*, maupun *human capital* ternyata tidak mampu secara otomatis memiliki hubungan dengan mutu dan pengembangan pendidikan. Pendidikan tidak cukup hanya didekati dengan beberapa variabel, tetapi multi-variabel.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis di masyarakat. Mulyanto Sumardi, peneliti senior masalah sosial keagamaan, dalam berbagai kesempatan sering menyatakan bahwa madrasah merupakan bentuk kongkrit dari *community based education* (pendidikan berbasis masyarakat). Hal tersebut tidaklah berlebihan karena hampir semua jenjang pendidikan madrasah (MI, MTs, dan MA) itu berstatus swasta. Dengan status yang sebagian besar swasta, maka keberlangsungan madrasah itu sangat tergantung kepada masyarakat.³

Padahal, dukungan keuangan dari masyarakat kepada madrasah masih sangat terbatas. Masyarakat masih mengutamakan sarana untuk ibadah seperti membangun masjid/musholla atau untuk pergi ibadah haji daripada membangun sarana pendidikan. Di samping itu, kemampuan orang tua yang menyekolahkan anaknya ke madrasah juga dari kalangan menengah ke bawah. Karenanya, masih susah diharapkan bantuan finansial yang besar dari masyarakat.

Pada tataran praksis, pengelolaan institusi pendidikan di Indonesia termasuk madrasah dan juga lembaga pendidikan umum lain mayoritas diselenggarakan dan dikelola oleh swasta.⁴ Kondisi ini menyimpan sekian banyak persoalan yang sangat kompleks khususnya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan madrasah swasta dalam menyediakan sarana dan fasilitas termasuk juga sumberdaya yang diperlukan dalam mengelola madrasah. Sementara itu, jumlah madrasah negeri jauh lebih sedikit dibandingkan dengan madrasah swasta, namun madrasah negeri mendapatkan perhatian dan fasilitas lebih baik daripada madrasah swasta.

Realitas inilah yang kemudian memunculkan dikotomi (swasta-negeri) dalam penyelenggaraan madrasah di Indonesia. Hampir pada semua jalur dan jenjang di hampir seluruh wilayah Indonesia, madrasah swasta selalu kalah bersaing dengan madrasah negeri. Apalagi kondisi ini diperparah dengan pola pikir masyarakat yang "negeri-minded".⁵

Di samping itu, pengembangan sumberdaya manusia di madrasah juga jarang diperhatikan oleh pemerintah, bila dibandingkan dengan sekolah yang

berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Guru di madrasah swasta itu jarang diikutkan pelatihan. Jika ada kesempatan, biasanya diambil dari guru dari sekolah/madrasah negeri. Madrasah swasta seakan menjadi "anak tiri" dari pemerintah karena sering diabaikan meskipun memiliki kontribusi kepada bangsa yang tidak kecil. Secara nasional, jumlah madrasah saat ini sebanyak 36.122 madrasah, dengan 5.449.370 siswa. Jumlah ini tentu sangat signifikan sumbangannya kepada bangsa dan negara. Dengan adanya madrasah, maka penduduk miskin yang jumlahnya tidak sedikit di negeri ini dan sebagian besar tinggal di pedesaan, bisa menikmati pendidikan yang merupakan hak setiap anak bangsa sebagaimana telah diamanatkan di dalam konvensi hak anak.⁶

Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya penelitian lembaga pendidikan dari aspek pengelolaan *social capital* (modal sosial) ini.⁷

1. *Human capital* dan *financial capital* ternyata tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak sedikit uang yang dikeluarkan oleh negara di pasca Orde Baru untuk meningkatkan pendidikan tetapi hasilnya belum menggembirakan. Anggaran pendidikan dari tahun 2002 ke 2003, naik lebih dari 100% (dari 25 trilyun menjadi 55 trilyun), tetapi hasilnya dari laporan *human resources indeks*, salah satu indikatornya pendidikan, ternyata justru merosot dari urutan 109 ke 112. Gaji guru selalu mendapatkan perhatian sehingga sekarang ini gaji guru PNS sudah semakin baik, tetapi cara mengajar juga masih belum banyak mengalami perubahan untuk membuat siswa menjadi siswa yang kreatif. Pelatihan juga sering diadakan bahkan setiap tahun berapa rupiah uang yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai pelatihan guru, tetapi *toh* hasil dari pelatihan tidak tampak, indikatornya mutu lulusan semakin jelek.

2. Kemampuan negara untuk membantu melalui *financial* dan *human capital* itu semakin terbatas. Bantuan keuangan negara kepada insititusi pendidikan semakin dikurangi, dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk membantunya. Demikian juga kemampuan negara untuk membantu meningkatkan kualitas SDM juga semakin terbatas karena kemampuan keuangan yang terbatas pula. Untuk menggandeng pihak swasta terlibat di dalam pengelolaan madrasah juga tidak mudah. Hal ini karena pihak swasta biasanya lebih menekankan pertimbangan untung dan rugi, maka mereka lebih tertarik untuk berinvestasi di dalam pengelolaan sekolah, seperti al-Azhar misalnya.⁸

3. Pada saat sekarang ini, potensi *sosial capital* yang berserakan di madrasah sebagian besar belum dikelola dengan baik, bahkan saat ini masih cenderung diabaikan. Pengelola madrasah lebih mengutamakan finansial dan *human capital* daripada *sosial capital*. Modal sosial akhirnya banyak yang menghilang di madrasah. Dengan demikian, yang terjadi justru kecurigaan, konflik antargeng, dan lemahnya spirit di dalam mengajar.⁹ Oleh karena itu, perlu dicari terobosan baru agar madrasah itu tetap terus maju dan tidak mengalami penurunan kualitas di tengah terbatasnya sarana prasarana dan minimnya keuangan serta rendahnya mutu SDM. Solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas madrasah yang berbasis pada potensi yang dimiliki oleh madrasah sendiri perlu terus digali.

Penelitian ini akan melihat lembaga pendidikan bukan dari pengembangan SDM atau dari sisi finansial, tetapi pengembangan *sosial capital* (modal sosial). Hal itu dibangun dari:

- a. Kemajuan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh modal keuangan dan ketersediaan SDM yang bagus, tetapi juga sangat ditentukan oleh *sosial capital* yang dimiliki oleh madrasah tersebut. SDM yang hebat tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari faktor lain. Tidak ada faktor yang tunggal untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat berat ini dan meliputi banyak aspek;
- b. Di dalam masyarakat madrasah itu berserakan modal sosial. Madrasah itu berdiri dan bertahan sampai sekarang bukan karena besarnya sumbangan dana yang mengalir ke madrasah tetapi karena di madrasah itu banyak modal sosial. Sehingga meskipun madrasah gurunya digaji dengan sangat kecil, kepala madrasah banyak yang harus *tombok* (menanggung kerugian), tetapi madrasah itu tetap berdiri kokoh dan menghasilkan kualitas lulusan yang berguna bagi masyarakat, mampu mandiri dan tidak membebani masyarakat.¹⁰

Peran dan Fungsi Modal Sosial dalam Pengembangan Madrasah

Tak selalu jelas diketahui alasan fungsi sosial terhadap perkembangan. Mungkin alasannya bermacam-macam dan berbeda-beda secara individual, namun ada beberapa kesamaannya, menurut pandangan masing-masing apa yang diharapkan dari modal sosial.¹¹

1. Modal sosial dapat membantu dalam mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Anak yang telah menamatkan madrasah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencarian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkahnya. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapannya memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah masih tetap dijadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah itu sendiri belum menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi, dengan ijazah yang tinggi, seorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinan atau tugas lain yang dipercayakan kepadanya. Dia memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya. Madrasah yang ditempuh seseorang banyak menentukan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

2. Modal sosial dapat membantu dalam memberikan keterampilan dasar. Orang yang telah bermadrasah setidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam tiap masyarakat modern. Selain itu, diperoleh sejumlah pengetahuan lain seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, biologi, bahasa, dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan pelajarannya, atau memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah dunia.

3. Modal sosial dapat membantu dalam membuka kesempatan memperbaiki nasib. Madrasah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Melalui pendidikan, orang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Orangtua mengharapkan agar anak-anaknya mempunyai nasib yang lebih baik karena berusaha untuk menyekolahkan anaknya jika mungkin sampai memperoleh gelar dari suatu perguruan tinggi, walaupun sering dengan pengorbanan yang besar mengenai pembiayaannya. Pada zaman sekarang, pendidikan tingkat madrasah sudah sulit untuk membawa kepada mobilitas sosial atau memperbaiki status sosial seseorang. Gelar akademis sangat membantu untuk meraih tempat dalam dunia pekerjaan. Mereka yang telah menduduki tempat yang tinggi memandang pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan status sosialnya.

4. Modal sosial dapat membantu dalam menyediakan tenaga pembangunan. Bagi negara-negara berkembang, pendidikan dipandang sebagai alat

yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam segala sektor pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila didukung oleh keahlian. Oleh karena itu, manusia merupakan sumber utama bagi pembangunan negara.

5. Modal sosial dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, pengrusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkoba, dan sebagainya.

6. Modal sosial dapat membantu dalam mentransmisi kebudayaan. Demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kepada generasi muda disampaikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa itu. Setiap warga negara diharapkan menghormati pahlawannya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek-moyang dan dengan demikian meresapkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

7. Modal sosial dapat membantu dalam membentuk manusia yang sosial. Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial, yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku bangsa, pendirian, dan sebagainya. Ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda-beda. Kalau diselidiki tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain mengapa orangtua menyekolahkan anaknya, misalnya menyekolahkan anak gadis sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya ke dalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusnya sendiri di rumah, dan sebagainya. Dalam hal ini, dapat diselidiki di antara berbagai alasan yang manakah yang paling utama maka mereka menyekolahkan anaknya. Hal itu lebih mengutamakan pendidikan anak pria dan agak mengabaikan pendidikan bagi anak wanita.

8. Modal sosial dapat membantu dalam mentransformasi kebudayaan. Lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, diharapkan menambah pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini. Ada tokoh pendidikan yang beranggapan bahwa madrasah dapat digunakan untuk merekonstruksi

masyarakat bahkan dapat mengontrol perubahan-perubahan itu dengan cara "*social engineering*".

Menurut Mitchell, modal sosial adalah seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara sekelompok orang yang karakteristik hubungan-hubungan tersebut berguna untuk menafsirkan motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini olehnya dipakai dalam rangka mengatasi kekurangan analisis struktural fungsional (Mitchell, 1969: 8). Modal sosial ini mempunyai kelebihan-kelebihan:

- a. Bisa melewati atau menerobos batas-batas yang tidak dapat dilampaui batas-batas formal;
- b. Bisa memahami struktur sosial dan kebudayaan secara lebih pasti, dengan modal penelitian kualitatif meskipun tidak meninggalkan model penelitian kuantitatif; dan
- c. Bisa meneliti hal-hal yang tersembunyi dalam masyarakat yang dimaksud bisa masuk ke jantung masyarakat yang diteliti.

David C. Korten memberi makna terhadap pembangunan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia. Menurutnya, pembangunan selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia.¹² Hal ini merupakan tahapan yang esensial dan fundamental menuju tercapainya tujuan kesejahteraan manusia. Kebutuhan dasar tidak dilihat hanya dalam batasan-batasan minimum manusia, yaitu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, tetapi juga sebagai kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair, serta tentu saja aktualisasi spiritual. Konsepsi akan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (*insan kamil*) dalam perpektif agama agaknya cukup relevan dalam konteks ini. Beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat ini akan dikemukakan sebagai berikut.

1. Pada intinya upaya-upaya pengembangan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial di mana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi. Oleh karena itu, tidak berwujud tawaran proyek usaha kepada masyarakat,

tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pengembangan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

2. Pengembangan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekadar memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tamal-sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar (*fresh money*) kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental "meminta".

3. Pengembangan masyarakat mesti dilihat sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Menurut Soedjatmoko, ada suatu proses yang sering kali dilupakan bahwa pembangunan adalah *sosial learning*.¹³ Oleh karena itu, pengembangan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif di mana kehidupan berkeluarga/tetangga, dan bernegara tidak sekadar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan sosial yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama.

4. Pengembangan masyarakat, tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pengembangan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Asumsinya, masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

5. Pengembangan masyarakat selalu ditengarai dengan adanya pemberdayaan masyarakat (*peoples empowerment*). Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu mekanisme dan sistem untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada

keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti. Memang, sering kali *peoples empowerment*awali dengan mengubah dahulu cara pandang masyarakat dari "*nrino ing pandan*" (hanya menerima, pasif), menjadi aktif-partisipatif.¹⁴

Dari asumsi-asumsi dasar tersebut, lahirlah hak, nilai, dan keyakinan dalam masyarakat yang harus dihormati, antara lain:

1. Hak menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hak ini muncul karena adanya keyakinan bahwa masyarakat memiliki kemampuan (*viabilitas*) memecahkan masalahnya sendiri;
2. Masyarakat mempunyai hak untuk berusaha menciptakan lingkungan yang diinginkannya dan menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar. Penciptaan lingkungan sesuai keinginan ini tetap didasari ketenangan dan ketenteraman lingkungan lainnya sehingga dalam diri masyarakat terjadi interaksi sosial aktif dan adaptif. Oleh karena itu, proses pembelajaran selalu lahir dari potensi sosial; dan
3. Masyarakat harus diyakini mampu bekerja sama secara rasional dalam bertindak untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitasnya, serta, bertindak dalam menggapai tujuan secara bersama. Dengan demikian, dalam pembangunan masyarakat penting untuk mempertahankan karakteristik komunitas dan masyarakat pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan penentuan dan kontribusi kekuasaan.¹⁵

Gambaran Umum Kebijakan Strategis Pembinaan Madrasah

Dari berbagai persoalan mengenai madrasah, sangatlah tidak mungkin bilamana madrasah diserahkan begitu saja oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perlu adanya pembenahan secara otonomi dari lembaga madrasah yang bersangkutan.

Kebijaksanaan strategis pengembangan madrasah pada era Indonesia baru, di mana aspirasi dan potensi daerah menjadi tumpuan utama dalam pembangunan, maka potensi madrasah yang dalam historisnya adalah milik masyarakat harus dikembalikan seperti semula. Pemerintah berperan sebagai pendamping masyarakat serta lembaga supervisi terutama dalam

mengembangkan muatan nasional dan ciri khas madrasah sebagai institusi pendidikan yang bernafaskan agama Islam dan mengembangkan kehidupan yang serba-ibadah.¹⁶

Reposisi terhadap madrasah sebagaimana dijelaskan di atas sekaligus merespon dan mengantisipasi adanya perkembangan dalam sistem pemerintahan RI, dari sentralistik kepada otonomi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Rasionalisasi pemikiran tentang madrasah, yang berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan ke depan sesuai dengan UU No. 22 /1999 dan UU No. 25 /1999 perlu ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan madrasah tetap dilakukan oleh masyarakat. Beberapa hal mengenai penyelenggaraan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama pada aspek pembiayaan, kelembagaan dan manajerial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; dan
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu atap pengelolaannya, yaitu dengan membentuk dinas pendidikan dan kebudayaan dengan sub dinas keagamaan, sedangkan departemen agama kabupaten/ kota berfungsi sebagai tugas pengendalian dan tugas-tugas agama.¹⁷

Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi pengorganisasian dan pengelolaannya, maka madrasah harus selalu dipahami dan ditempatkan tanggung jawab yang sama dengan institusi pendidikan lainnya. Sebagai institusi pendidikan, yang bernafaskan agama, maka madrasah harus bergerak dalam mekanisme organisasi yang profesional, dengan formulasi pengorganisasian dan penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian dan pengelolaan madrasah dalam arti penataan dan pengaturan seluruh komponen pendidikan yang memungkinkan tercapainya tujuan institusional, secara bertahap dilimpahkan kepada pihak madrasah (*school-based management*) dan didukung oleh masyarakat (*community-based education*), sehingga madrasah tidak terisolasi dari komunitasnya;
- b. Orientasi pengorganisasian dan pengelolaan madrasah diarahkan kepada terciptanya hubungan timbal-balik antara madrasah dan masyarakat dalam rangka memperkuat posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan;

- c. Struktur pengorganisasian dan pengelolaan madrasah bersifat fleksibel sesuai madrasah dan pengelolaan madrasah bersifat terbuka dan demokratis;
- d. Pengelolaan madrasah dikembangkan melalui pendekatan profesional yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya segenap potensi madrasah;
- e. Manajemen madrasah diberi peluang yang memungkinkan terciptanya kerja sama dengan unsur dan unit kerja lain dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan;
- f. Pengelolaan madrasah perlu mengembangkan konsep-konsep keterpaduan yang mencakup keterpaduan lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dan keterbukaan antarjenjang madrasah (MI, MTs, dan MA);
- g. Pengawasan atau kontrol pengorganisasian dan pengelolaan madrasah dilakukan oleh suatu badan atau dewan sekolah yang memiliki kompetensi sebagai pendamping pengelola madrasah; dan
- h. Perlu disiapkan perangkat atau tindakan hukum bagi mereka yang melanggar atau menyimpang dari prosedur dan etika pengelolaan dan pengorganisasian madrasah.¹⁸

Unsur Penting Modal Sosial dalam Pengembangan Madrasah

Selama satu dekade terakhir, modal sosial menjadi salah satu primadona perhatian di kalangan ilmu sosial, baik sosiologi, ekonomi, maupun politik. Modal sosial juga telah merambah menjadi pembicaraan para ahli di bidang kesehatan, kriminologi pendidikan dan sebagainya. Perhatian serius terhadap modal sosial tampaknya paralel dengan perhatian kepada pemberdayaan masyarakat, *civil society*, dan sebagainya.

Konsep modal sosial dalam *mainstream* ilmu sosial sebagai alat yang sistematis untuk menjelaskan fenomena pertama kali diusung dan dilakukan oleh James Coleman (1988).¹⁹ Konsep tersebut semakin dipopulerkan oleh Putnam (1993, 1995, 1999), Fukuyama (1995), dan ilmuwan sosial lainnya. Pada akhir-akhir ini, World Bank sebagai institusi keuangan internasional yang

banyak menyalurkan bantuan ke negara dunia ketiga juga tertarik dengan kajian yang menginginkan konsep modal sosial.²⁰

Putnam (1993) juga mengkaji tentang kehidupan politik di Italia menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan masyarakat madani (*civic community*). Sosial kapital tersebut mengacu pada aspek-aspek utama organisasi sosial seperti kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitasi tindakan yang terkoordinasi (1993: 167).²¹ Menurut Putnam, kerjasama mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial yang substansial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal-balik (*reciprocity*) dan jaringan antarwarga.

Fukuyama (1995) dalam *In Trust: The Social Capital Values and The Creation of Prosperity* mengkaji bidang ekonomi menyatakan bahwa modal sosial yang berintikan kepercayaan (*trust*) merupakan dimensi dari kehidupan yang sangat menentukan dalam menuju keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini berbeda jauh dengan modal material atau modal ekonomi, modal sosial justru semakin bertambah apabila semakin dikelola dan dipergunakan dengan baik. Penggunaan modal sosial akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan suatu kegiatan pembangunan secara umum.²²

Menurut Fukuyama, kepercayaan (*trust*) muncul jika dalam masyarakat tersebut terdapat nilai (*shared values*) sebagai dasar dari kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Dengan kepercayaan, orang tidak akan mudah curiga yang sering menjadi penghambat dari strategi pengembangan. Di samping itu, jaringan (*networks*) memiliki dampak yang sangat positif dalam usaha peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal.²³

Halpem (2005) secara eksplisit menyatakan bahwa modal sosial itu meliputi yaitu jaringan, norma, dan sanksi. Modal sosial antara komunitas yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Halpen ingin mencoba menerapkan modal sosial itu di dalam semua bidang, termasuk pendidikan, ekonomi bahkan untuk mencegah kriminalitas.²⁴

Pandangan di atas memberi pemahaman bahwa modal sosial itu merupakan elemen yang mencakup: *Pertama*, *trust* (saling percaya) yang meliputi kejujuran, keadilan, sikap egaliter, toleran, keramahan, dan saling menghormati; *Kedua*,

jejaring sosial (*social networks*), yang meliputi partisipasi, resiprositas (pertukaran timbal-balik), solidaritas dan kerjasama; dan *Ketiga*, pranata (*institutions*) yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama (*shared value*), norma dan saksi, serta aturan-aturan. Elemen pokok dari modal sosial tersebut bukan datang dari langit (berkembang dengan sendirinya), tetapi harus diciptakan, dikembangkan, dan digunakan melalui mekanisme sosial budaya di dalam sebuah unit sosial seperti komunitas, keluarga, institusi sosial (pendidikan, kesehatan dan sebagainya).

Dari beberapa teori modal sosial sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat diambil pengertian tentang modal sosial yang relevan dengan tujuan pembahasan ini adalah potensi secara fisik dan spiritual yang dimiliki oleh komunitas madrasah sebagai lembaga pendidikan yang apabila modal sosial tersebut dibangun dan ditumbuhkembangkan secara baik merupakan kekuatan strategis untuk mengembangkan madrasah khususnya, dan lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya. Adapun modal sosial yang dimiliki madrasah antara lain: kiai atau ulama, tokoh masyarakat, aparat madrasah, para *agbniya* atau orang kaya, lembaga-lembaga pendidikan level di bawah, sejajar maupun di atasnya, dinas-dinas dan departemen terkait, komite sekolah, dewan pendidikan, murid dan peserta didik yang sangat bervariasi, dan lain-lain yang semuanya merupakan potensi yang perlu dan sangat penting untuk dikelola secara baik.

Selama ini, perspektif modal sosial belum banyak digunakan untuk membedah fenomena pendidikan. Para peneliti lebih cenderung mengkaji dari struktur seperti keuangan, sarana, kurikulum dan instrumen lain. Di samping itu, peneliti lain juga lebih tertarik dengan menggunakan perspektif aktor seperti melihat kepemimpinan kepala madrasah, guru, siswa dan sebagainya. Perspektif tersebut tidaklah salah karena struktur dan aktor memang sering menjadi *variable independen* yang sangat menentukan. Akan tetapi, institusi pendidikan tidak cukup hanya didekati dari perspektif struktur atau aktor saja. Tidak sedikit madrasah unggulan yang dipenuhi segala fasilitas sarana dan aktor sumber daya manusia yang hebat, tetapi produk yang dihasilkan kalah dibandingkan dengan sekolah/madrasah yang memiliki struktur dan SDM yang terbatas. Madrasah/sekolah unggulan mendapatkan perhatian dari pemerintah/donor

yang tidak sedikit, tetapi kenyataannya tidak semua mampu mengembangkannya. Pengembangan madrasah di atas belum sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkannya.

Secara umum, unsur-unsur dari sistem sosial adalah terdiri dari status, peranan dan perbedaan sosial, tetapi banyak sekali komponen yang terkandung dalam pengertian sistem sosial itu. Menurut Alvin L. Bertrand (1980), ada sepuluh unsur yang terkandung dalam sistem sosial:²⁵

1. *Keyakinan (pengetahuan)*. Keyakinan merupakan unsur sistem sosial yang dianggap sebagai pedoman dalam melakukan penerimaan suatu pengetahuan dalam kehidupan kelompok sosial dalam masyarakat. Keyakinan ini secara praktis biasanya digunakan dalam kelompok masyarakat yang masih tergolong terbelakang segi pengetahuannya sehingga dalam menilai suatu kebenaran dirumuskan melalui keyakinan bersama. Misalnya, dalam menilai berbahaya atau tidak dalam menerima anggota baru pada suatu kelompok atau organisasi sosial, dinilai berdasarkan kekuatan keyakinan;

2. *Perasaan (sentimen)*. Perasaan, menunjuk pada perasaan pada anggota suatu sistem sosial (anggota kelompok) tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa, dan tempat-tempat tertentu. Unsur perasaan sangat membantu dalam rangka menjelaskan pola-pola tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan melalui cara-cara lain. Suatu keberhasilan suatu sistem juga tergantung perasaan para anggotanya secara umum. Jika di dalam suatu sistem terdapat banyak anggota saling menaruh perasaan dendam, benci, dan iri antara satu sama lainnya, maka bisa diketahui bahwa hubungan kerja samanya tidak akan berhasil dengan baik;²⁶

3. *Tujuan, sasaran atau cita-cita*. Cita-cita, tujuan atau sasaran, di dalam suatu sistem sosial merupakan pedoman bertindak agar program kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dapat tercapai secara efektif;

4. *Norma*. Norma-norma sosial, menurut Alvin, dapat dikatakan sebagai patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan di dalam situasi-situasi tertentu. Unsur norma ini merupakan komponen sistem sosial yang dapat dianggap paling kritis untuk memahami serta meramalkan aksi atau tindakan manusia;

5. *Status dan peranan*. Dengan status, seseorang dapat menentukan sifat dan tingkatan kewajiban serta tanggung jawab di dalam suatu kelompok masyarakat; di samping juga menentukan hubungan antara atasan dan bawahan

yang tidak sedikit, tetapi kenyataannya tidak semua mampu mengembangkannya. Pengembangan madrasah di atas belum sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkannya.

Secara umum, unsur-unsur dari sistem sosial adalah terdiri dari status, peranan dan perbedaan sosial, tetapi banyak sekali komponen yang terkandung dalam pengertian sistem sosial itu. Menurut Alvin L. Bertrand (1980), ada sepuluh unsur yang terkandung dalam sistem sosial:²⁵

1. *Keyakinan (pengetahuan)*. Keyakinan merupakan unsur sistem sosial yang dianggap sebagai pedoman dalam melakukan penerimaan suatu pengetahuan dalam kehidupan kelompok sosial dalam masyarakat. Keyakinan ini secara praktis biasanya digunakan dalam kelompok masyarakat yang masih tergolong terbelakang segi pengetahuannya sehingga dalam menilai suatu kebenaran dirumuskan melalui keyakinan bersama. Misalnya, dalam menilai berbahaya atau tidak dalam menerima anggota baru pada suatu kelompok atau organisasi sosial, dinilai berdasarkan kekuatan keyakinan;

2. *Perasaan (sentimen)*. Perasaan, menunjuk pada perasaan pada anggota suatu sistem sosial (anggota kelompok) tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa, dan tempat-tempat tertentu. Unsur perasaan sangat membantu dalam rangka menjelaskan pola-pola tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan melalui cara-cara lain. Suatu keberhasilan suatu sistem juga tergantung perasaan para anggotanya secara umum. Jika di dalam suatu sistem terdapat banyak anggota saling menaruh perasaan dendam, benci, dan iri antara satu sama lainnya, maka bisa diketahui bahwa hubungan kerja samanya tidak akan berhasil dengan baik;²⁶

3. *Tujuan, sasaran atau cita-cita*. Cita-cita, tujuan atau sasaran, di dalam suatu sistem sosial merupakan pedoman bertindak agar program kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dapat tercapai secara efektif;

4. *Norma*. Norma-norma sosial, menurut Alvin, dapat dikatakan sebagai patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan di dalam situasi-situasi tertentu. Unsur norma ini merupakan komponen sistem sosial yang dapat dianggap paling kritis untuk memahami serta meramalkan aksi atau tindakan manusia;

5. *Status dan peranan*. Dengan status, seseorang dapat menentukan sifat dan tingkatan kewajiban serta tanggung jawab di dalam suatu kelompok masyarakat; di samping juga menentukan hubungan antara atasan dan bawahan

terhadap anggota lain dalam kelompok masyarakat. Menurut Alvin, status merupakan serangkaian tanggung jawab, kewajiban serta hak-hak yang sudah diberikan dalam suatu masyarakat. Adapun pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemangku suatu status, dinamakan peranan. Peranan-peranan sosial saling berpadu sedemikian rupa sehingga saling tunjang menunjang secara timbal-balik di dalam hal yang menyangkut tugas, hak dan kewajiban. Oleh karena itu, penampilan peranan status (*status-role performance*) adalah proses menunjukan atau penampilan dari status dan peranan sebagai unsur struktural di dalam sistem sosial;²⁷

6. *Tingkatan atau pangkat*. Tingkatan atau pangkat merupakan unsur sistem sosial yang berfungsi menilai perilaku-perilaku anggota kelompok. Sebaliknya proses penilaian terhadap perilaku-perilaku anggota kelompok dimaksudkan untuk memberikan kepangkatan (status) tertentu yang dianggap sesuai dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai. Orang yang dianggap berhasil dalam melaksanakan tugasnya, bisa dinaikkan pangkatnya (status) ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu seterusnya sehingga berbagai aktivitas tampak saling bergantung sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai sistem sosial;

7. *Kekuasaan atau pengaruh*. Istilah kekuasaan menunjuk pada kapasitas penguasaan seseorang terhadap anggota-anggota kelompok atau organisasi. Kekuasaan seseorang dalam mengawasi anggota kelompok biasanya dapat dilihat dari status yang dimiliki. Pengaruhnya sangat besar dalam pengambilan keputusan. Biasanya pemegang kekuasaan mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mempengaruhi para anggota kelompoknya. Dalam analisis sistem sosial, kekuasaan merupakan patokan bagi para anggota suatu kelompok atau organisasi dalam menerima berbagai perintah dan tugas;

8. *Sanksi*. Sanksi merupakan ancaman hukum yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya yang dianggap melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan. Penerapan sanksi oleh masyarakat ditujukan agar pelanggarnya dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku;²⁸

9. *Sarana atau fasilitas*. Secara umum sarana dimaksudkan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sistem sosial. Yang paling penting dari unsur sarana adalah terletak dari kegunaannya bagi suatu sistem sosial.

Dalam analisis sistem sosial pada prinsipnya mengutamakan fungsi dari suatu sarana agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, betapapun sederhananya sarana tersebut; dan

10. *Tekanan ketegangan*. Di dalam sistem sosial senantiasa terjadi ketegangan kerana dalam kehidupan masyarakat tidak ada satupun anggotanya yang mempunyai perasaan dan interpretasi sama terhadap kegiatan dan masalah yang sedang dihadapi bersama. Itulah sebabnya, suatu ketegangan hubungan antaranggota kelompok masyarakat pada batas waktu tertentu dapat terjadi.²⁹

Modal sosial itu bervariasi, terkadang kuat tetapi suatu saat melemah. Menurut Putnam dinyatakan bahwa terdapat dua tipe modal sosial, yaitu *bonding social capital* dan *bridging, social capital*. Pola pertama lebih pada tindakan melihat ke dalam saja, sedangkan pola kedua merujuk pada pola melihat kepentingan masyarakat secara luas. Orientasi modal sosial yang *bonding* lebih banyak diwamai semangat "*fight againts*" yang bersifat memberi perlawanan karena dianggap ada ancaman. Adapun *bridging social capital* lebih memiliki spirit "*fight for*" (berjuang untuk). Artinya, mereka berjuang untuk menyelesaikan persoalan bersama yang dihadapi baik oleh komunitasnya maupun komunitas yang lain.

Penutup

Modal sosial masyarakat dalam bidang pendidikan (madrasah) merupakan suatu yang akan diintrodusir sebagai pendekatan baru dalam bidang pendidikan khususnya dalam pengembangan madrasah yang memerlukan penanganan yang tepat, jelas, transparan efektif, efisien dan memerlukan sebuah wadah yang memenuhi akuntabilitas publik. Dalam rangka meningkatkan modal sosial, perlu ada aturan main yang jelas sehingga memudahkan untuk menetapkan tolok ukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Endnotes

¹ HAR. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 87.

² Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 76.

³ Umberto Sihombing, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 56.

⁴ Data tentang kondisi madrasah di Departemen Agama pada tahun 2005/2006 menunjukkan bahwa jumlah MI negeri sebanyak 113 (3,04%) dengan jumlah murid 21.093

(4,37%), sementara MI swasta berjumlah 3604 (96,96%) dengan jumlah murid 483.525 (95,83%). MTs negeri berjumlah 115 (8,41%) dengan jumlah murid 40.789 (11,53%), sedangkan MTs swasta berjumlah 1.251 (91,59%) jumlah murid 320.168 (88,47%), MA negeri berjumlah 64 (15,53%) jumlah murid 33.268 (27,63%) dan MA swasta berjumlah 348 (84,47%) jumlah murid 87.110 (72,33%).

⁶ Soyanto dan M.S. Abas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hal. 94.

⁷ Abdurrahman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 68.

⁸ Zubaidi, "Strategi dan Program Pengembangan Madrasah dalam Era Otonomi Daerah", Penelitian pada Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang (2002).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ David Halpem, *Sosial Capital* (Cambridge: Polity Press, 2005), hal. 76.

¹² Ruddy Agusyanto, *Dampak Modal Modal Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1996), hal. 16.

¹³ David C Korten, *Community Management: Asian Experience and Perspectives* (Connecticut: Kumarian Press, 1987), hal. 17.

¹⁴ Soedjatmoko, "Sosiati Energy as a Development Resource", dalam David C. Korten, *Community Management: Asian Experience and Perspectives* (Connecticut: Kumarian Press, 1987), hal. 20.

¹⁵ Dirangkum dari Donald, W. Litereel, *The Theori and Practice of Community Development. A Guide for Practitioners*, seperti disadur oleh M. Djauzi Mudzakir, *Teori dan Praktik Pengembangan Masyarakat* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 12-15.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 15-16.

¹⁷ Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa (Visi Misi dan Aksi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 143.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 144.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 144-147.

²⁰ Coleman, J.S., "Sosial Capital In The Creation of Human Capital" dalam *American Journal of Sociology*, hal. 23.

²¹ R.D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), hal. 134.

²² *Ibid.*, hal. 167.

²³ F. Fukuyama, *Trust: The Sosial Virtues and The Creation of Prosperity* (New York: Free Press, 1995), hal. 123.

²⁴ *Ibid.*, hal. 125.

²⁵ David Halpen, *Sosial Capita* (Cambridge: Polity, 2005), hal. 12.

²⁶ Alvin L. Bertrand, *Sosiologi*, Terj. Sanapiah S.F. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1980), hal. 43.

²⁷ *Ibid.*, hal. 45.

²⁸ *Ibid.*, hal. 46.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Alvin L. Bertrand, *Sosiologi*, hal. 47.

Daftar Pustaka

- Agusyanto, Ruddi. 1996. *Dampak Modal-modal Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Bertrand, Alvin L. 1980. *Sosiologi*, Terj. Sanapiah S. F. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Coleman, J.S. TT. "Sosial Capital In The Creation of Human Capital", dalam *American Journal of Sociology*.
- Dirjen Binbaga Islam Depag RI. 2006. *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah*. Jakarta: Depag RI.
- Fajar, A. Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Sosial Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Halpem, David. 2005. *Sosial Capital*. Cambridge: Polity Press.
- Korten, David C. 1987. *Community Management; Asian Experience and Perspectives*. Connecticut: Kumarian Press.
- Mudzakir, M. Djauzi. 1986. *Teori dan Praktik Pengembangan Masyarakat*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Saleh, Abdurrahman. 2004. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, Umberto. 2002. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sindhunata. 2002. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soedjatmoko. 1987. "Sosiati Energy as a Development Resource", dalam David C. Korten, *Community Management; Asian Experience and Perspectives*. Connecticut: Kumarian Press.
- Suyanto dan MS Abas. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zubaidi. 2002. "Strategi dan Program Pengembangan Madrasah dalam Era Otonomi Daerah". Penelitian pada Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang.